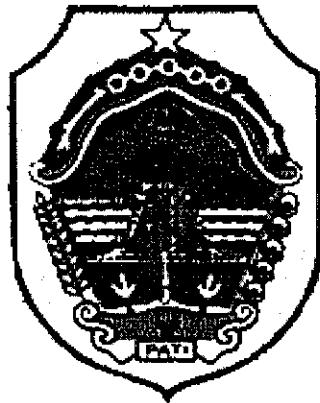


**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PATI

Nomor : 25/ VIII / NK / 2020

Nomor : 09/ VIII / NK / 2020

Tanggal : 22 Agustus 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

Nomor : 25 / VIII / NK / 2020
Nomor : 09 / VIII / NK / 2020
Tanggal : 22 Agustus 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.**
Jabatan : Bupati Pati
Alamat Kantor : Jalan Tombonegoro Nomor 1 Pati
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pati
2. a. Nama : **H. ALI BADRUDIN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pati
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati
b. Nama : **H. JONI KURNIANTO, S.T., M.MT**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati
c. Nama : **H. HARDI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati
d. Nama : **H. MUHAMMADUN**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati
Alamat Kantor : Jalan Dr. Wahidin Nomor 2 A Pati

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021. Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Pati, 22 Agustus 2020

BUPATI PATI



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PATI

Selaku,
PIHAK KEDUA

H.ALI BADRUQIN, SE.
KETUA

H.JONI KURNIANTO, ST, M.MT.
WAKIL KETUA

H.HARDI
WAKIL KETUA

H.MUHAMMADUN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6
 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.	
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	19
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	42
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	69
3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	95
 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	361
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	361
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
Dinas Kesehatan	365
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	383
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN	
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
Satuan Polisi Pamong Praja.....	386
BPBD	389
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
Dinas Sosial dan P3A dan KB.....	391
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN	
DENGAN PELAYANAN DASAR	
BIDANG TENAGA KERJA	
Dinas Tenaga Kerja.....	392
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Dinas Sosial dan P3A dan KB.....	395
BIDANG PANGAN	
Dinas Ketahanan Pangan.....	396
BIDANG PERTANAHAN	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	399
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
Dinas Lingkungan Hidup.....	400
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
Dinas Administrasi Kependudukan dan Capil	404
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	407
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Dinas Sosial dan P3A dan KB.....	410
BIDANG PERHUBUNGAN	
Dinas Perhubungan.....	411
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Dinas Komunikasi dan Informatika.....	415
BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	417
BIDANG PENANAMAN MODAL	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.....	420
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.....	423

BIDANG STATISTIK	
Dinas Komunikasi dan Informatika.....	424
BIDANG PERSANDIAN	
Dinas Komunikasi dan Informatika.....	425
BIDANG KEBUDAYAAN	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	425
BIDANG PERPUSTAKAAN	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	426
BIDANG KEARSIPAN	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	428
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Dinas Kelautan dan perikanan.....	429
BIDANG PARIWISATA	
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.....	434
BIDANG PERTANIAN	
Dinas Pertanian.....	436
BIDANG PERDAGANGAN	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	440
BIDANG PERINDUSTRIAN	
Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	443
BIDANG TRANSMIGRASI	
Dinas Tenaga Kerja.....	444
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	
Sekretariat Daerah.....	444
SEKRETARIAT DPRD	
Sekretariat DPRD	448
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	450
KEUANGAN	
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	455
KEPEGAWAIAN	
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	459
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.....	461

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	461
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	
Inspektorat Daerah.....	462
UNSUR KEWILAYAHAN	
Kecamatan Pati	465
Kelurahan Parenggan.....	465
Kelurahan Pati Wetan.....	466
Kelurahan Pati Kidul.....	468
Kelurahan Kalidoro.....	470
Kelurahan Pati Lor.....	471
Kecamatan Pati	473
Kecamatan Margorejo.....	475
Kecamatan Tlogowungu.....	477
Kecamatan Gembong.....	479
Kecamatan Tayu	481
Kecamatan Margoyoso.....	484
Kecamatan Gunungwungkal.....	486
Kecamatan Cluwak	488
Kecamatan Dukuhseti.....	491
Kecamatan Kayen	493
Kecamatan Gabus	495
Kecamatan Tambakromo	497
Kecamatan Sukolilo	500
Kecamatan Juwana	502
Kecamatan Trangkil	505
Kecamatan Wedarijakska	507
Kecamatan Batangan	509
Kecamatan Jakenan	512
Kecamatan Jaken	514
Kecamatan Winong	516
Kecamatan Pucakwangi	518
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Badan Kesbangpol	520

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	525
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	526
BAB VI PENUTUP	527